

# MENYOAL KOMERSIALISASI PENDIDIKAN DI INDONESIA

**Musayyidi**

Institut Kariman Wirayudha (INKADHA) Sumenep

## *Abstract*

Privatisasi pendidikan oleh Pemerintah telah melegitimasi komersialisasi pendidikan dengan menyerahkan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan ke pasar. Dengan begitu, nantinya sekolah memiliki otonomi untuk menentukan sendiri biaya penyelenggaraan pendidikan. Sekolah tentu saja akan mematok biaya setinggi-tingginya untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu. Akibatnya, akses rakyat yang kurang mampu untuk menikmati pendidikan berkualitas akan terbatas dan masyarakat semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial, antara yang kaya dan miskin. Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, atau tepatnya, tidak harus murah atau gratis. Tetapi persoalannya siapa yang seharusnya membiayai? Dalam hal ini Pemerintah sebenarnya yang berkewajiban untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu

*Keywords* : *Menyoal, Komersialisasi Pendidikan*

## **Pendahuluan**

Pendidikan adalah bagian penting dari kehidupan manusia, dari pertama manusia diciptakan telah mengenal apa yang di sebut dengan pendidikan, sehingga pendidikan selalu menarik untuk di bahas dan dikaji dengan mendalam. Pendidikan selalu berkembang seiring dengan perkembangan kemajuan berpikir ummat manusia, pada awal keberadaan manusia di muka bumi kebutuhan akan

pendidikan masih sangat sederhana. Dimana nabi adam hanya butuh dididik oleh Allah SWT secara langsung. Allah sebagai sumber pengetahuan dan yang disifati dengan Maha Mengetahui telah berikan bekal kepada nabi Adam, untuk menjalankan tugas kepemimpinannya di bumi, sebagai tujuan awal penciptaan manusia.

Menurut Sahabat Ali ra, ada enam syarat bagi para pencari pengetahuan dan kebenaran sejati dalam hidup agar bisa melaksanakan tugas kekholidafahan sesuai dengan koridor yang telah terjaustifikasi dalam irodattullah. Syarat pertama adalah adanya potensi berfikir cerdas untuk bisa melakukan internalisasi setiap ilmu pengetahuan yang telah ditransformasikan oleh orang yang dengan sengaja mengajari dan mendidiknya atau dari setiap pengakajian dan penelitian untuk mengambil sebuah konklusi relatif sebelum diyakini sebagai sebuah pengetahuan dengan kebenaran absolut.

Kedua yaitu adanya kemauan kuat disertai rasa ingin tahu terhadap semua objek yang belum di ketahui. Dengan rasa ingin tahu manusia akan mengeksplorasikan potensi dirinya demi sebuah pengetahuan. Setiap usaha untuk memuaskan rasa ingin tahu, apabila telah terjawab dengan kesimpulan awal, akan memunculkan kembali rasa ingin tahu kepada sesuatu yang lebih sempurna dan absolut kebenarannya setelah melalui proses koreksi dan evaluasi.

Ketiga adalah kesabaran dalam melakukan observasi ataupun eksperimen ilmu pengetahuan, terlebih terhadap ilmu pengetahuan yang abstrak, berbeda dengan ilmu terapan yang tingkat pencapaian dan keberhasilannya terukur dengan rumus dan juga hasil eksperimen. Sedangkan ilmu pengetahuan yang abstrak menuntut sebuah pemahaman secara mendalam, pada saat itulah di butuhkan kesabaran untuk mendapatkan konklusi positif, konklusi awal dari sebuah pengkajian memiliki probabilitas untuk memunculkan mafhum mukholafah dari konklusi awal.

Keempat ialah adanya biaya atau kemampuan untuk membiayai proses pendidikan yang akan di tempuhnya, syarat keempat ini di era awal perkembangan Islam tidak terlalu urgen, pada saat zakat dan infaq dari para kaya masih tersalurkan dengan baik kepada lembaga pemerintah yang kemudian di distribusikan diantaranya kepada lembaga pendidikan. Hal ini berbanding terbalik dengan kebutuhan pendidikan di abad modern, disaat formalitas menuntut sebuah kemampunan, maka kebutuhan terhadap biaya akan menjadi lebih besar, dan bahkan saat ini pendidikan telah menjadi barang mahal dan sulit terjangkau oleh kalangan tidak mampu, lebihh ironis lagi saat ini paradigma masyarakat indonesia

mengidentikkan pendidikan berkualitas dengan biaya mahal, sehingga apabila ada lembaga pendidikan yang menawarkan mutu bagus dan dengan biaya gratis tidak akan serta merta di percaya, hal ini menambah rumitnya pendidikan. Syarat keempat ini lah yang akan menjadi topik bahasan kami.

Syarat kelima setiap proses tranformasi dan aktualisasi sebuah pengetahuan membutuhkan adanya pembimbing atau guru. Kedudukan guru sangat urgen, walaupun sekarang media pembelajaran dan pengetahuan telah banyak dan sangat mudah untuk di peroleh tetap tidak akan menggeser dan menggantikan kedudukan para guru. Bila guru di asumsikan sebagai transformator semata maka posisinya bisa digantikan dengan media dan sumber belajar lainnya. Namun apabila guru di posisikan sebagai teladan dan orang yang telah mengaktualisasikan pengetahuan dalam hidup dan kehidupannya, maka posisi guru tidak akan bisa tergantikan oleh sumber belajar yang lain.

Islam begitu memulyakan kedudukan ilmu pengetahuan sehingga harus dicari selama manusia hidup. Manusia yang memiliki kesadaran terhadap pentingnya Iman, Islam, Ihsan, dan IPTEK, tidak akan pernah puas dengan ilmu yang dimiliki, sehingga akan selalu belajar dan mengkaji tentang alam sebagai makrokosmos dan dirinya sendiri sebagai mikrokosmos, agar menjadi manusia paripurna (Insan Kamil).

Sesuai dengan sifatnya yang tidak pernah berakhir dari sisi proses (*never ending process*), pendidikan itu mempunyai banyak fase untuk ditelaah. Pendidikan memang muncul dalam berbagai bentuk dan paham. Menurut Paulo Freire pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan fungsi manusia menjadi manusia agar terhindar dari berbagai bentuk penindasan, kebodohan sampai kepada ketertinggalan.<sup>1</sup> Pada dasarnya pendidikan memang diselenggarakan dalam rangka membebaskan manusia dari berbagai persoalan hidup.

Selain itu pendidikan banyak dipahami sebagai wahana untuk menyalurkan ilmu pengetahuan, alat pembentukan watak, alat mengasah otak, serta media untuk meningkatkan ketrampilan kerja.<sup>2</sup> Sementara bagi paham lain, pendidikan lebih diyakini sebagai suatu media untuk menanamkan nilai-nilai moral dan ajaran keagamaan, alat meningkatkan taraf ekonomi, alat mengurangi kemiskinan, alat mengangkat status sosial, dan juga wahana untuk menciptakan keadilan sosial.

---

<sup>1</sup>Firdaus M. Yunus, *Pendidikan Berbasis Realitas Sosial*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2005), Hal 1.

<sup>2</sup>Francis Wahono, *Kapitalisme Pendidikan Antara Kompetisi dan keadilan*, (Yogyakarta: Insist Press, 2001), Hal 2.

## **Kapitalisme Sebagai Akar Komersialisasi Pendidikan**

Secara etimologis, kapitalisme berasal dari bahasa latin “*Caput*” (kata benda) dan “*Capitalis*” (kata sifat) yang berarti “kepala” atau “yang berkaitan dengan kepala”. Kaitan dengan kata ini, kapitalisme berarti *usaha untuk mempertahankan kepala, kehidupan, dan kesejahteraan*.<sup>3</sup> Secara terminologis, kapitalisme dipakai untuk menamai sistem ekonomi yang mendominasi dunia Barat sejak runtuhnya feodalisme.

Sebagai sebuah sistem, kapitalisme terkait dengan hubungan antara pemilik pribadi atas alat produksi seperti tanah dan instalasi industri, yang secara keseluruhan disebut modal atau kapital dan para pekerja yang tidak mempunyai modal. Max Weber (1867-1920), peletak dasar sosiologi modern dalam bukunya *The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism* mendefinisikan “kapitalisme sebagai hadirnya industri bagi kebutuhan kelompok manusia yang dilaksanakan dengan metode perusahaan yang dikelola secara rasional”,<sup>4</sup> seperti adanya neraca modal. Weber menggunakan semangat kapitalisme untuk menggambarkan sikap mental yang selalu berusaha mencari keuntungan secara rasional dan sistematis.

Kapitalisme sebagai sistem baru telah berkembang sejak zaman kuno, dan selalu mengalami masa kemajuan dan masa kemerosotan. Karena kapitalisme merupakan suatu sistem yang terus mengalami perkembangan dalam upaya eksistensi dirinya, kapitalisme mempunyai ciri-ciri yang berbeda-beda pada setiap zamannya. Secara umum ciri-ciri kapitalisme dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu kapitalisme klasik dan kapitalisme modern.

## **Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas**

“*Pendidikan bermutu itu mahal*”. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah. Untuk masuk TK dan SDN saja saat ini dibutuhkan biaya Rp 500.000, — sampai Rp 1.000.000. Bahkan ada yang memungut di atas Rp 1 juta. Masuk SLTP/SLTA bisa mencapai Rp 1 juta sampai Rp 5 juta.

---

<sup>3</sup>Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), Hal 52.

<sup>4</sup>Ibid., 53.

Makin mahalny biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS di Indonesia pada realitanya lebih dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, Komite Sekolah/Dewan Pendidikan yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha. Asumsinya, pengusaha memiliki akses atas modal yang lebih luas. Hasilnya, setelah Komite Sekolah terbentuk, segala pungutan uang kadang berkedok, “sesuai keputusan Komite Sekolah”. Dampaknya, daya finansial sebagian masyarakat di negeri ini masih belum sanggup dan memadai karena tidak semua masyarakat Indonesia mempunyai pendapat yang pasti dan serba berkecukupan.

Kondisi ini akan lebih buruk dengan adanya RUU tentang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP). Berubahnya status pendidikan dari milik publik ke bentuk Badan Hukum jelas memiliki konsekuensi ekonomis dan politis amat besar. Dengan perubahan status itu pemerintah secara mudah dapat melemparkan tanggung jawabnya atas pendidikan warganya kepada pemilik badan hukum yang sosoknya tidak jelas. Perguruan Tinggi Negeri pun berubah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Munculnya BHMN dan MBS adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan yang kontroversial.

Privatisasi pendidikan oleh Pemerintah telah melegitimasi komersialisasi pendidikan dengan menyerahkan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan ke pasar. Dengan begitu, nantinya sekolah memiliki otonomi untuk menentukan sendiri biaya penyelenggaraan pendidikan. Sekolah tentu saja akan mematok biaya setinggi-tingginya untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu, sekolah juga menentukan kebijakan pendaftaran siswa baru (PSB) dengan angka yang relatif membuat orang tua siswa mengeraskan dahi untuk mengumpulkan jumlah nominal yang tidak sedikit. Akibatnya, akses rakyat yang kurang mampu untuk menikmati pendidikan berkualitas akan terbatas dan masyarakat semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial, antara yang kaya dan miskin.

Jika pendidikan bermutu itu harus mahal, maka argumen ini hanya berlaku di Indonesia. Di Jerman, Perancis, Belanda, dan di beberapa negara berkembang lainnya, banyak sekolah yang bermutu namun biaya pendidikannya rendah. Bahkan beberapa negara ada yang menggratiskan biaya pendidikan.

Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, atau tepatnya, tidak harus murah atau gratis. Tetapi persoalannya siapa yang seharusnya membiayai? Dalam hal ini Pemerintah sebenarnya yang berkewajiban untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses

masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Secara teori dan kebijakan undang-undang memang diatur di Indonesia, misalnya di UUD 1945 amandemen IV menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Dan UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (SISDIKNAS)<sup>5</sup> pasal 11 Ayat 2, Pasal 12 ayat 1, pasal 34 ayat 2.

Impian masyarakat akan datangnya pendidikan gratis yang telah ditunggu-tunggu dari sejak zaman kemerdekaan Republik Indonesia telah muncul dengan seiring datangnya fenomena pendidikan gratis untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Fenomena pendidikan gratis ini memang sangat ditunggu-tunggu, pasalnya Pemerintah mengeluarkan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) untuk menutupi harga-harga buku yang kian hari kian melambung, sumbangan ini itu, gaji guru yang tidak cukup dan biaya-biaya lainnya. Dan tidak bisa dipungkiri keberadaan dana BOS sejak tahun 2005 relatif terbatas.

Masuk dan berkembangnya kapitalisme di dunia pendidikan ditandai dengan semakin maraknya pembangunan sekolah-sekolah swasta dengan memberlakukan perilaku pasar bebas dan dunia bisnis di dunia pendidikan (sekolah).

Maraknya pasar bebas didunia pendidikan, dilandasi pada suatu ideologi yang berangkat dari kepercayaan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dapat dicapai sebagai hasil normal dari “kompetisi bebas”.<sup>6</sup> Kompetisi Pasar Bebas merupakan suatu kompetisi yang agresif akibat dari terjaganya mekanisme pasar bebas. Kesemua keyakinan ini berangkat dari suatu pendirian bahwa “pasar bebas” itu efisien, dan pasar bebas diyakini sebagai cara yang tepat untuk mengalokasikan sumber daya alam yang langka, demi untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Pasar bebas dan bisnis yang berlaku di sekolah-sekolah semakin berkembang pesat, dengan banyaknya program baru yang semakin menekan dan melumpuhkan orang tua sebagai wali murid dalam membiayai sekolah anaknya. Program sekolah itu berupa seperti adanya pengadaan kaos olah raga, study tour, daftar ulang, perubahan warna baju seragam sekolah setiap tahunnya, gantinya terbitan buku pelajaran setiap semester dan lain sebagainya, yang semua itu dikoordinir oleh pihak sekolah.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional

<sup>6</sup>Wahono, *Kapitalisme Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), Hal 2.

<sup>7</sup>Darmaningtyas, *Pendidikan yang Memiskinkan*, (Yogyakarta: Galang Press, 2004), Hal 229.

Program tersebut dilandasi atas alasan untuk meningkatkan kualitas anak didik dan untuk mempermudah jalannya sistem pendidikan di sekolah, tapi dibalik itu semua terdapat adanya dunia bisnis, dimana seorang guru dan lembaga berfungsi sebagai birokrasi perusahaan dengan mendapatkan keuntungan yang besar.

Semua praktisi bisnis di sekolah itu berjalan lancar karena kolusi antara pengusaha (industri wisata, penerbitan, tekstil, asuransi, sepatu dan lain sebagainya) dengan penguasa maupun pelaksana pendidikan,<sup>8</sup> yang mana pastinya mereka mendapat keuntungan yang sangat besar dari praktisi bisnis tersebut.

Lain halnya dengan masyarakat yang menjadi korban, dengan adanya program-program tersebut, mereka semakin terlumpuhkan dan tertekan dengan biaya sekolah. Sehingga mereka selalu dihantui rasa takut dengan biaya sekolah yang mahal dan keputus-asaan dalam menuntut ilmu.

Dengan adanya buku pelajaran yang selalu berganti setiap tahunnya atau terkadang setiap semester, maka buku-buku tersebut tidak dapat diwariskan kepada adiknya atau tetangga yang membutuhkan, begitupula dengan seragam sekolah. Padahal jika tidak ada beberapa program tersebut, para orang tua dapat menghemat biaya pendidikan, dan dapat menyekolahkan anaknya sampai selesai sehingga akan semakin berkurang data anak yang putus sekolah (*drop-out*).

Dari beberapa program sekolah diatas, betapa program sekolah telah turut menyumbang terjadinya proses "*Pemiskinan*" dan "*Pembodohan*" di masyarakat, karena semakin banyaknya anak didik yang tidak dapat menyelesaikan program study mereka sampai selesai, dikarenakan biaya sekolah yang mahal dan hanya dapat dijangkau oleh mereka yang ekonominya terjangkau.

## **Faktor Penyebab Kapitalisme dan Komersialisasi Pendidikan**

Berkembangnya kapitalisme pendidikan di sekolah adalah dampak dari zaman globalisasi dan juga dampak dari kesalahan Paradigma dan Pendekatan. Kesalahan ini merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda dan oleh pemerintah orde baru sampai kini masih dilanjutkan tanpa sadar.

Kesalahan paradigma tersebut adalah menanamkan paradigma "*kompetisi*" dalam pendidikan, dan bukan paradigma "*keadilan sosial*" yang seharusnya ditanamkan pada masyarakat. Sekilas paradigma itu adalah wajar-wajar saja,

---

<sup>8</sup>Ibid., 250.

namun apabila diteliti lebih jeli, kompetisi dalam orde baru adalah kamuflase dari mempertahankan status-quo ekonomi-sosial yang sangat timpang.<sup>9</sup>

Sebagai contohnya adalah pembedaan alokasi subsidi yang bias pada sekolah-sekolah negeri top dan di ibu kota yang menganaktirikan sekolah-sekolah negeri bawahan dan jauh dari pusat, atau di kabupaten pelosok tanah air.

Contoh lain adalah pembedaan perlakuan antara sekolah-sekolah yang dikelola oleh Negara (sekolah negeri) dan sekolah-sekolah yang dikelola oleh swasta. Biasanya yang dikelola oleh Negara adalah anak emas dan yang dikelola oleh swasta adalah anak tiri. Pembedaan ini adalah pembedaan sistematis, artinya untuk maksud tujuan politik ekonomi tertentu.

Paradigma “kompetisi” lebih mengimplikasikan pendekatan *kapitalis liberalis*-di Indonesia ditambah dengan ajektif “feodal”-“sumber daya manusia”.<sup>10</sup> Pendekatan “sumber daya manusia” mengandaikan investasi dalam bentuk uang maupun tenaga kerja, dimana manusia disama-ratakan dengan barang. Pendekatan ini dibesarkan oleh pemikir ekonom klasik mengenai “pertumbuhan ekonomi”.

Dari kesalahan paradigma dan pendekatan yang menyebabkan adanya pembedaan dan perhatian pemerintah dalam hal alokasi subsidi antara sekolah negeri dan sekolah swasta, membuat sekolah-sekolah swasta kekurangan dana dalam pengembangan pendidikan, khususnya menghadapi zaman globalisasi ini.

Maka dalam melengkapi fasilitas sekolah agar tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan, dan untuk menggaji para guru, pihak sekolah menarik uang SPP yang tidak sedikit dan lebih mahal dari sekolah negeri, selain itu juga masih ada dana potongan yang dibebankan kepada orang tua murid, seperti biaya ujian, uang rapor, uang ijazah, perayaan hari besar, uang UKS, OSIS, dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Dengan beratnya tanggungan ekonomi sosial pendidikan ini mengakibatkan ketimpangan ekonomi sosial bagi guru/dosen di satu pihak, tetapi juga bagi peserta didik dan keluarganya di lain pihak, sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat penyelesaian atau pelulusan peserta didik, yakni sepertiga dari jumlah pendaftar.

Dengan kata lain drop-out atau putus sekolah sebelum waktunya merupakan dampak dari beratnya tanggungan dan ketimpangan ekonomi sosial,

---

<sup>9</sup>Wahono, *Kapitalisme Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), Hal 86.

<sup>10</sup>Ibid., 89.

<sup>11</sup>Ade Irawan, dkk, *Mendagangkan sekolah*, (Jakarta: Yayasan Tifa, 2004), Hal 96.



sehingga semakin banyak anak didik yang tidak mendapatkan hak-hak mereka dalam dunia pendidikan.

## Tata Pendidikan Berkeadilan Sosial

Pendidikan adalah kebutuhan dasar (*basic need*) hidup manusia.<sup>12</sup> Pendidikan juga merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia, tapi kenyataan yang terjadi pendidikan dan pengajaran di dalam paradigma neokolonial Indonesia selama ini hanya diajukan demi fungsinya terhadap kebutuhan penguasa, tidak demi masyarakat.

Maka sudah saatnya kita merubah paradigma pendidikan yang selama ini keliru. Paradigma pendidikan yang seharusnya ditanamkan adalah paradigma “keadilan sosial”, yang direkomendasi oleh Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 27. yang pertama menjadikan “ikut mencerdaskan kehidupan bangsa”, yang kedua menjamin “hak memperoleh pendidikan untuk semua”.<sup>13</sup>

Paradigma “keadilan sosial” menuntut dijadikannya dasar membangun sistem persekolahan maupun pendidikan masyarakat luas usaha-usaha secara preferensial untuk mensubsidi peserta didik yang tertinggal secara ekonomi sosial. Subsidi tidak hanya berupa materi termasuk uang, tetapi berupa juga pendampingan ekstra. Maksudnya, agar beban ekonomi sosial tidak menjadi kendala untuk mengembangkan kepandaian otak dan keluhuran watak.

Dalam paradigma “Kompetisi”, menggunakan pendekatan “*sumber daya manusia*”. Lain halnya dengan paradigma “keadilan sosial”, menggunakan pendekatan “*pemberdayaan manusia*”. Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai manusia. Manusia tidak disejajarkan dengan barang. Manusia merupakan makhluk otonom yang merdeka, mempunyai potensi-potensi yang dapat dikembangkan dan direalisasikan.

Mekanisme paradigma “keadilan sosial” adalah “penetasan kemakmuran”. Argumentasinya asal ada pertumbuhan, pemerataan, atau distribusi berjalan dengan sendirinya. Pendidikan yang berkeadilan ini akan terlaksana bilamana kita semua serius mentransformasikan pendidikan menuju ke pendidikan yang menempatkan manusia sebagai manusia.<sup>14</sup>

Jika paradigma ini terlaksana, maka tidak akan ada lagi beratnya tanggungan dalam dunia pendidikan dan ketimpangan ekonomi sosial bangsa.

<sup>12</sup>Firdaus M. Yunus, *Pendidikan Berbasis Realitas Sosial*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2005), Hal 7.

<sup>13</sup>Wahono, *Kapitalisme Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) Hal, 87.

<sup>14</sup>Ibid., 107.

*Musayyidi*

Dengan paradigma “keadilan sosial” semua anak didik akan mendapatkan haknya dalam menuntut ilmu, dan kemungkinan besar akan terjadinya pengurangan dalam jumlah anak didik yang putus sekolah.

Selain itu para pendidik atau guru juga akan mendapatkan kesejahteraan yang semestinya dan yang memang sudah seharusnya mereka terima sebagai para pendidik. Sebagaimana pernyataan KH. Syukri Zarkasyi bahwa agar pendidikan dapat berjalan secara efektif, efisien dan tetap survive khususnya di zaman globalisasi ini maka kesejahteraan guru harus sangat diperhatikan.<sup>15</sup> Mengingat mereka adalah orang-orang yang mencerdaskan kaderisasi bangsa.

Dengan adanya paradigma keadilan dalam dunia pendidikan, baik dalam hal subsidi antara sekolah negeri dan sekolah swasta, diharapkan tidak ada lagi kesan “sekolah mahal” dan sekolah hanya dapat dijangkau oleh mereka yang berekonomi tinggi, tapi semua manusia dapat mendapatkan haknya dalam dunia pendidikan.

### **Komersialisasi Pendidikan dalam Pandangan Islam**

Manusia adalah *homo educandum* (makhluk pebelajar) karena dia terlahir ke dunia untuk melaksanakan tugas beratnya sebagai pemimpin makrokosmos, keberadaan mikro kosmos sangat berpengaruh terhadap lestarnya peradaban dan kehidupan alam semesta, untuk itulah Islam hadir sebagai agama cinta kasih untuk sekalian alam.

Islam dengan qonun syar'inya telah menerapkan pola regenerasi islam dengan pendidikan. Solusi yang ditawarkan Islam di masa kejayaan Islam telah berhasil ciptakan generasi haus ilmu dan cinta pengetahuan hal ini di sebabkan oleh berbagai macam faktor diantaranya mekanisme dan sistem kelembagaan pendidikan Islam membuka peluang dan kesempatan bagi generasi untuk belajar tanpa di bebani oleh biaya pendidikan.

Pada prinsipnya pendidikan dalam islam harus di orientasikan kepada upaya pengejawantahan nilai-nilai *ilahiah* dan internalisasinya dalam diri generasi Islam. Agar dia mampu mengaktualisasikan dirinya menjadi wakil tuhan, pengenalan kepada Tuhan melalui sifat-sifat dan nama-nama-Nya adalah untuk mengenalkan hakikat Tuhan, untuk kemudian belajar bertaqorrub kepada Dzat

---

<sup>15</sup>Syukri Zarkasyi, “ Pengembangan Pendidikan Pondok Pesantren di Era Otonomi Pendidikan: Pengalaman Pondok Modern Darussalam Gontor”, (disertasi: UIN Syarif Hidayatullah, 2005), Hal 29.

yang sudah diyakini adanya, sesuatu yang sulit terjadi, penyerahan diri kepada Dzat yang sejatinya tidak diketahui dan tidak dikenali.<sup>16</sup>

Kemutlakan Allah dengan segala dimensi-Nya harus tampak dalam seluruh komponen pendidikan Islam, mulai visi dan misi, standar isi, standar sarana ataupun standar proses dan komponen pendukung lainnya. Dimensi keabsolutan Allah sebagai sumber kebenaran sejati melahirkan cara pandang epistemologis tentang apa yang disebut dengan pengetahuan, tidak ada pengetahuan yang diasumsikan sebagai sebuah pengetahuan yang benar dan berlaku secara universal jika tidak didasarkan kepada ayat-ayat Allah baik Ayat Qauliyah ataupun Ayat Kauniyah.<sup>17</sup>

Islam menegaskan dalam banyak tekstual ayat ataupun hadits nabi, bahwa mencari ilmu adalah wajib dan hak tiap manusia, maka perlu kiranya dibuatkan lembaga-lembaga pendidikan yang dibiayai oleh pemerintah Islam. Di era awal perkembangan Islam tepatnya masa para sahabat sampai masa tabiit tabiin pembelajaran dilakukan di masjid-masjid dan di kuttab serta dirumah para sahabat. Namun sejak dinasti bani Umayyah dan Abbasiyah pembelajaran telah terorganisir dengan baik contohnya madrasah An-nidhomiyah yang dibiayai oleh pemerintah Abbasiyah.

Lembaga pendidikan sangat dipengaruhi oleh sistem kebijakan pemerintah dan paradigma yang berkembang di masyarakat. Hampir seluruh persoalan di zaman ini yang tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari keterkaitan-keterkaitan struktural, sehingga harus menemukan rumusan-rumusan kebijakan universal dan dapat mengeneralisasi semua persoalan termasuk pendidikan. Apabila kita melihat kebijakan pemerintah Indonesia dengan berbagai macam undang-undang pendidikan yang tidak mengaplikasikann keadilan sosial.

Pendidikan dengan sistem kapitalisme global akan menghasilkan cendekiawan yang dahsyat intelektualitasnya, tetapi tidak memiliki tradisi olah spiritual yang sesungguhnya sangat diperlukan sehingga sering ada yang terabaikan ketika harus menyelami sistuasi-sistuasi budaya masyarakat dan kemanusiaan. Kualitas pendidikan sejauh ini hanya menghasilkan manusia parsial. Kaum intelektual modern yang tidak meng-kerjasama-kan proses intelektualnya dengan olah spiritual membuat sukar masuk dan di terima di kalangan masyarakat. Karena sesungguhnya ummat dan masyarakat itu lebih

---

<sup>16</sup>Hasan Basri. *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), Hal 45

<sup>17</sup>Tedi Priatna. *Reaktualisasi paradigma Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), Hal 19.

karib untuk di dekati dengan metode metode kultur yang muatan utamanya adalah spiritualitas.

Dampak kedua dari pendidikan dengan materialisme global akan membuat kalangan masyarakat yang tidak siap secara materi dan mental akan terpinggirkan. Mereka akan menjaga jarak dengan semua bentuk prodak duniawi karena akan mengarahkan pada hubbud dunya. Sehingga ada kecenderungan untuk lebih mendalami spiritualitas, dan laku ibadah dengan mengesampingkan wawasan intelektual sehingga gagal memperoleh kematangan mental. Dengan demikian fungsi kesejarahan dan kekholfahannya tidak maksimal. Banyak tokoh spiritual keagamaan tetapi kualitasnya stereotipikal, karena rendahnya tradisi intelektualnya tidak membawanya ke pemahaman-pemahaman yang memadai tentang masalah-masalah di zamannya.

Konsistensi pemerintah dan masyarakat harus disinergikan untuk menghadirkan sebuah lembaga pendidikan berkualitas dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga tidak akan ada lagi kesenjangan dalam dunia pendidikan. Islam dengan slogannya *education for All* adalah pengejawantahan dari kesmestaan faham agama universal untuk kelestarian alam semesta. Ia hadir untuk memberikan jaminan kepada semua ummat untuk mendapatkan haknya dan bisa terlaksananya kewajiban personal ataupun keseluruhan.

Islam yang di bawa oleh Nabi Muhammad memposisikan derajat para iman dan pencari ilmu dengan derajat dan martabat khusus di hadapan Allah dan seluruh ciptaannya. Keimanan seseorang hanya dapat dilihat dari amal perbuatan hasil dari aplikasi dan implementasi ilmu yang telah diserap dan diperoleh dalam proses pembelajaran. Amaliah seseorang yang berdasarkan tauhid vertikal ataupun tauhid horizontal bisa dijadikan indikator ketercapaian pendidikan. Manusia yang memiliki kesholehan spriritual dan keshalehan sosial adalah hasil dari sebuah lembaga pendidikan yang menerapkan kurikulum akhlaq mulia dan wawasan global.<sup>18</sup>

Sejarah modern meletakkan manusia dalam bentuk perhubungan yang lebih sistemik, kohesif satu sama lain, *multirelated*, maka salah benar dan baik buruk lebih bersifat kolektif di banding individual. Adanya degadensi moral dan kepribadian generasi Islam dalam sistem sosial semacam ini terkait dengan berbagai macam historisitas. Misalnya tawuran, tidak semata-mata karena punya

---

<sup>18</sup>Akhdiayat, *Ilmu pendidikan Islam*, (Bandung: Insan Mandiri. 2007), Hal 76.

niat untuk berkelahi, tetapi perbuatannya berhubungan dengan kondisi kondisi makro-eksternal di lingkungannya.

Seorang anak menjadi bringas *drop-out* dari sekolahnya mungkin karena produk ketimpangan ekonomi sehingga tidak sanggup untuk melanjutkan pendidikan minimal sampai tamat SMA. Sebenarnya istilah tamat dan lulus tidak bisa dijadikan sebagai tendensi keberhasilan sebuah sistem pendidikan, secara faktual kurikulum pendidikan yang ada saat ini lebih menekankan kepada target pencapaian materi, dibanding ketercapaian indikator pembelajaran.

Kesenjangan ekonomi memiliki dampak yang sangat besar terhadap terselenggaranya pendidikan yang baik dan berkualitas, untuk mengatasi hal tersebut maka perlu kiranya melihat kembali kepada sistem pendidikan Islam yang di bangun di atas prinsip keadilan, artinya setiap orang berhak untuk mendapatkan pembelajaran, agar dia bisa hidup dan memaknai kehidupannya. Rasanya tidak perlu diikuti sistem pendidikan kapitalisme dan materialisme global, yang telah menggeser nilai dan peranan pendidikan menjadi lembaga penghasil pekerja profesional miskin pemaknaan.

Nilai dan peranan pendidikan harus tetap dilaksanakan di atas prinsip-prinsip keisalaman dalam pendidikan. Sebagai lembaga pembangun akhlaq dan wawasan Islam dan global harus memiliki konsistensi dan kematangan untuk tetap membendung arus kapitalisme dan matrealisme. Pendidikan yang berbasis keIslaman akan menciptakan generasi profesional yang memiliki kematangan mental dan keshalehan spiritual.

Kondisi pendidikan sekarang lebih banyak menciptakan peluang-peluang ketidak jujuran dan keterpaksaan. Adanya manipulasi, kebohongan kecurangan serta keserakahan, dan lain sebagainya mungkin karena tidak adanya peluang yang lebih baik untuk dilakukan di tengah atmosfer sistemik pendidikan yang memaksa untuk memiliki perilaku menyimpang, atau bahkan mungkin ke-tidak baik-an yang dilakukan karena kondisi kepribadian dan moralnya secara bertahap telah di lemahkan dan di hancurkan oleh sistem pendidikan yang telah membuatnya drop-out dari sekolahnya dan juga kondisi lingkungan yang hanya memberikan pilihan semacam itu yang sebenarnya tidak diinginkan dan tidak disenangi.

Dalam pandangan Islam pendidikan berkualitas dan bermutu memang membutuhkan biaya dan modal penyelenggaraan proses pembelajaran, namun hal ini bukan berarti biaya pendidikan harus di tanggung oleh peserta didik. Ada banyak pilihan yang di tawarkan melalui mekanisme *keadilan*, misalkan dengan

pembuatan Undang-undang pendidikan, biaya pendidikan di tanggungkan kepada pemerintah atau orang kaya dengan penarikan zakat dan shodaqoh, atau lembaga pendidikan harus memiliki aset usaha yang bisa menghasilkan kemudian digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan.

Potensi zakat yang di miliki ummat Islam akan mengurangi beban kalangan tidak mampu untuk tetap eksis dalam kehidupan dan memperoleh kelayakan hidup. Walaupun tidak mudah untuk menjalankan pilihan ini, ada berbagai macam keabsahan yang harus dipenuhi, yaitu : amil zakat, sistematika zakat, kelembagaan yang kredibel dan akuntabel. Di tengah krisis kepercayaan personal sulit rasanya untuk mengembangkan sistem ini, akan tetapi kesulitan itu jangan sampai menjadi aral untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkeadilan sosial. Tidak adanya pilihan yang lebih mudah untuk di jalankan memaksa kita untuk tetap mencoba tawaran ini demi tercapai tujuan pendidikan menurut Islam, yaitu memanusiaikan manusia ketaraf paripurna (*Insan Kamil*).

Tawaran kebijakan pemerintah apabila yang dijadikan sampel adalah pemerintah Indonesia, sepertinya sulit hal itu terwujud dengan sistem trias politika saat ini, terlalu banyak muatan kepentingan kelompok dalam pengambilan kebijakan, sulit untuk menciptakan undang-undang yang memayungi kepentingan hidup bangsa. Adanya UU Sisdiknas, RUU BHP (badan hukum pendidikan) adalah gambaran dari sistem yang terlalu banyak muatan kepentingan.

## **Kesimpulan**

Pendidikan adalah sesuatu yang urgen untuk eksistensi manusia. Dan akan selalu menjadi topik menarik untuk di perbincangkan dan dilakukan penelitian. Namun ketika pendidikan telah mengalami kemajuan melahirkan problem baru, diantaranya adalah mahalnya biaya pendidikan. Hal ini sebenarnya bisa diatasi dengan melakukan perubahan terhadap sistem pendidikan yang berasal dari kebijakan pemerintah. Sehingga komersialisasi dalam dunia pendidikan bisa di perkecil dengan adanya penanggungan biaya pendidikan yang oleh pemerintah dan lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidanga pendidikan.

Contoh pendidikan pada masa keemasan keilmuan islam di topang oleh zakat para kaya yang diserahkan kepada pengelola zakat untuk kemudian didistribusikan kepada lembaga pendidikan. Apakah indonesia akan selamanya selalu terpuruk? Atau kemudian bangkit untuk merubah peringkat kita dalam pendidikan sebagai rangking ke 124 di dunia.

Lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga swakelola yang tumbuh subur dipesantren dan lingkungan masyarakat adalah sebagai bukti sumbangsuhnya kepada bangsa ini. Namun eksistensinya semakin termarjinalkan tatkala tidak mampu bersaing dengan lembaga pendidikan yang di biyai oleh pemerintah, sehingga pesantren banyak yang harus merekonstruksi ulang sistem kelembagaannya. Tantangan inilah yang menyebabkan mahalnya biaya pendidikan, karena pesantren dan lembaga pendidikan swasta islam harus berupaya untuk menjaga kesinambungan pembelajaran dengan memungut dana penyelenggaraan pendidikan dari wali murid, hal yang juga membentuk paradigma bahwa pendidikan berkualitas dan bermutu itu mahal.

Potensi zakat yang di miliki ummat Islam juga akan bisa mengurangi beban kalangan tidak mampu untuk tetap eksis dalam kehidupan dan memperoleh kelayakan hidup. Walaupun tidak mudah untuk menjalankan pilihan ini, ada berbagai macam keabsahan yang harus dipenuhi, yaitu : amil zakat, sistematika zakat, kelembagaan yang kredibel dan akuntabel

Tulisan ini tentu banyak memiliki kekurangan, sehingga sumbangsuh pemikiran dari para pembaca kami harapkan untuk penyempurnaan pengetahuan keilmuan kami.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhdiyat. *Ilmu pendidikan Islam*, Bandung : Insan Mandiri, 2007.
- Armando. Nina M. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Basri. Hasan. *Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2009.
- Darmaningtyas. *Pendidikan yang Memiskinkan*, Yogyakarta: Galang Press, 2004.
- Irawan, Ade. dan dkk. *Mendagangkan sekolah*, Jakarta: Yayasan Tifa, 2004.
- Priatna, Tedi. *Reaktualisasi paradigma Pendidikan Islam*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Wahono, Francis. *Kapitalisme Pendidikan Antara Kompetisi dan Keadilan*.  
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

*Musayyidi*

Yunus. Firdaus M. *Pendidikan Berbasis Realitas Sosial*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2005.

Zarkasyi. Syukri. *Pengembangan Pendidikan Pondok Pesantren di Era Otonomi Pendidikan* (disertasi: UIN Syarif Hidayatullah, 2005).